

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, TINGKAT PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Kuliah guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



**Oleh:**

**WULANDARI AGUSTININGSIH  
12812141020**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, TINGKAT PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Kuliah guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



**Oleh:**

**WULANDARI AGUSTININGSIH  
12812141020**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

**PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, TINGKAT PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**WULANDARI AGUSTININGSIH**

**NIM. 12812141020**



Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 04 Maret 2016

Untuk dipertahankan didepan TIM Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui  
Dosen Pembimbing



Isroah, M.Si  
NIP. 19660704 199203 2 003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

### **PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA**



Yang disusun oleh :

**WULANDARI AGUSTININGSIH**

**NIM. 12812141020**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada tanggal 21 Maret 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

#### DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Kedudukan	Tanda tangan	Tanggal
Dhyah Setyorini, M.Si	Ketua Penguji		4-4-2016
Isroah, M.Si	Sekretaris Penguji		4-4-2016
Amanita Novi Yushita, SE., M.Si	Penguji Utama		4-4-2016

Yogyakarta, 7 April 2016

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 0023

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Wulandari Agustiningih  
NIM : 12812141020  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENERAPAN E-FILING,  
TINGKAT PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP  
PRATAMA YOGYAKARTA.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.  
S sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau  
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata  
penulisan ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 1 Febuari 2016

Penulis,



Wulandari Agustiningih

NIM. 12812141020

## **MOTTO**

1. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Asy-Syarh:6-8).
2. Harta yang paling berharga dan tak akan pernah habis adalah ilmu yang kita punya (Sudirman Ledang).
3. Tidak ada hidup yang bersih dari hambatan. Mengatasi hambatan itulah yang membuat kita berhasil (Mario Teguh).
4. Selalu lakukan yang terbaik karena waktu tak akan pernah kembali (Penulis).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karyaku yang sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Bapakku tersayang Sudirman Ledang, yang selalu menyayangi dan menyemangatiku untuk terus belajar, belajar dan belajar tanpa pernah merasa bosan, selalu berjuang memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, dan selalu berusaha mewujudkan mimpi anak-anaknya. Semoga harapan terbesar putri kecil mu ini untuk membuat mu bangga bisa terwujud.
2. Ibuku tercinta Sri Murni, yang telah melahirkan, membesarkanku dan mendidikku dengan penuh ketulusan, yang selalu perhatian, selalu menyemangati juga mendoakan keberhasilanku. Semoga harapan terbesar putri kecil mu ini untuk membuatmu bahagia bisa tercapai.
3. Almamater ku tercinta, Universitas Negeri Yogyakarta.

## **BINGKISAN**

Karya ini juga sebagai bingkisan kepada kedua adik-adikku yang ku sayangi Nursakinah Nofiatiningsih dan Desi Permata Sari yang selalu mendukungku. Semoga aku bisa menjadi kakak dengan figur terbaik yang bisa kalian jadikan sebagai contoh.

# **“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA”**

**Oleh:**  
**Wulandari Agustiningsih**  
**12812141020**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (2) Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (3) Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (4) Pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 70 responden. Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *incidental sampling*. Kuesioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji linearitas uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4%. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan Koefisien determinasi 0,444 yang berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 44,4%. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,621 berarti kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 62,1%. (4) Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan Nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu  $59.820 > 3,94$ .

**Kata Kunci :** Kepatuhan wajib pajak, *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak.

**“THE EFFECT OF IMPLEMENTATION E-FILING, LEVEL OF TAX  
UNDERSTANDING AND TAXPAYERS CONSCIOUSNESS ON  
TAXPAYERS COMPLIANCE IN KPP PRATAMA YOGYAKARTA”**

**BY:**  
**Wulandari Agustiningsih**  
**12812141020**

**ABSTRAK**

*The purpose of this study was to determine: (1) The effect of implementation e-filing on compliance taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta. (2) The effect of level of tax understanding on compliance taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta (3) The effect of consciousness taxpayers on compliance taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta. (4) The effect of implementation e-filing, level of tax understanding and consciousness taxpayers on compliance taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta.*

*The population in this study is taxpayers registered as user e-filing taxpayers in KPP Pratama Yogyakarta. The number of samples in this study is 70 respondents. Data in this study were obtained primary through questionnaires. The sampling technique used incidental sampling method. Questionnaires were tested by validity test and reliability test before this study. Classic assumption test were used is normality test, linearity test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing were used is a simple and multiple linear regression analysis.*

*The results showed that: (1) The implementation e-filing has positive and significant effect on the taxpayers compliance in KPP Pratama Yogyakarta. This is evidenced by the value of coefficient of determination of 0.454, which means that implementation e-filing affect taxpayer compliance as big as 45,4%. (2) The level of tax understanding has positive and significant effect on the taxpayers compliance in KPP Pratama Yogyakarta. This is evidenced by the value of coefficient of determination of 0,444 which means level of tax understanding affect taxpayer compliance as big as 44,4%. (3) The taxpayers consciousness has positive and significant effect on the taxpayers compliance in KPP Pratama Yogyakarta. This is evidenced by the value of coefficient of determination of 0,621 which means that taxpayers consciousness affect taxpayer compliance as big as 62,1%. (4) The effect of implementation e-filing, level of tax understanding and taxpayers consciousness has positive and significant on the taxpayers compliance in KPP Pratama Yogyakarta This is evidenced by F count larger than F table is  $59.820 > 3,94$ .*

**Key Words:** *taxpayers compliance, e-filing, level of tax understanding, taxpayers consciousness*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta”. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Isroah, M.Si., Wakil Dekan III FE UNY sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, bimbingan serta ilmu dalam menyusun tugas akhir ini dengan baik.
4. Abdullah Taman, M.Si.Ak.CA., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Mahendra Adhi Nugroho, S.E., M.Sc., Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Amanita Novi Y, S.E., M.Si., Dosen narasumber yang telah memberikan koreksi dan ilmu yang bermanfaat.

7. Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., Ketua penguji yang telah membantu dalam proses ujian Tugas Akhir Skripsi.
8. Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih telah menjadi ibu selama masa perkuliahan.
9. Segenap dosen dan staf karyawan Universitas Negeri Yogyakarta.
10. Kepala Kantor Wilayah Pajak Yogyakarta dan Pegawai pajak yang telah membantu selama penelitian.
11. Keluarga tersayang, Papa, Mama, Nofi, Desi, Mbak Yeni, Mas Agus, Abang Indra, Mbak Vera, Kak Nurul, dan Nia terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan selama ini.
12. Muji Burrahman, terima kasih atas bantuan dan semangat selama penelitian.
13. Lilis, Ana, Dayan, Icha, Susmi. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu menyemangati.
14. Teman-teman Akuntansi A 2012 terima kasih telah menjadi keluarga selama 8 semester ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan terbaik oleh Allah SWT. Amin. Harapan penulis semoga apa yang terkandung didalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 1 Febuari 2016

Penulis,



Wulandari Agustiningsih  
NIM. 12812141020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Perpajakan.....	12
a. Pengertian Pajak .....	12
b. Pembagian Hukum Pajak.....	13

c. Jenis Pajak.....	14
d. Subjek Pajak.....	16
e. Objek Pajak.....	16
f. Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
g. Fungsi SPT.....	17
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan.....	18
b. Jenis Kepatuhan Perpajakan .....	20
c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
3. Penerapan <i>e-filing</i> .....	24
a. Pengertian <i>e-filing</i> dan <i>e-SPT</i> .....	24
b. Latar Belakang <i>e-filing</i> .....	25
c. Dasar Hukum <i>e-filing</i> .....	26
d. Prosedur Penggunaan <i>e-filing</i> .....	27
e. Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses <i>e-filing</i> .....	29
f. Indikator <i>e-filing</i> .....	30
4. Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	33
a. Pengertian Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	33
b. Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	34
5. Kesadaran Wajib Pajak.....	43
a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	43
b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	44

B. Penelitian yang Relevan .....	45
C. Kerangka Berfikir.....	50
D. Paradigma Penelitian.....	55
E. Hipotesis Penelitian .....	56
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Desain Penelitian.....	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	58
C. Variabel Penelitian.....	59
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	59
E. Populasi dan Sampel Penelitian .....	63
F. Teknik Pengambilan Data .....	64
G. Instrumen Penelitian.....	65
H. Uji Coba Instrumen.....	67
1. Uji Validitas Data.....	67
2. Uji Reliabilitas.....	72
I. Teknik Analisis Data.....	74
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	74
2. Uji Prasyarat Analisis.....	75
a. Uji Normalitas.....	75
b. Uji Linearitas.....	75
c. Uji Multikolinearitas.....	75
d. Uji Heteroskedastisitas.....	76
J. Uji Hipotesis.....	76

1. Analisis Regresi Sederhana.....	76
2. Analisis Regresi Berganda.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
A. Deskripsi Data Umum.....	79
B. Deskripsi Data Khusus.....	85
C. Hasil Analisis Data.....	94
1. Uji Asumsi Klasik.....	94
2. Uji Hipotesis.....	98
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	108
E. Keterbatasan Penelitian.....	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN .....	125

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skor Skala Likert.....	66
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	66
3. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
4. Hasil Uji Validitas Penerapan <i>e-filing</i> .....	70
5. Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	71
6. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	71
7. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	73
8. Pembagian Kuesioner (angket).....	85
9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	87
10. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	88
11. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan <i>e-filing</i> .....	90
12. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	92
13. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	94
14. Uji Statistik Non Parametrik Kolmogrov-Smirnov.....	95
15. Hasil Uji Linearitas.....	96
16. Hasil Uji Multikolinearitas.....	97
17. Hasil Uji regresi linear sederhana variabel penerapan <i>e-filing</i> .....	99
18. Hasil Uji regresi linear sederhana variabel pemahaman Perpajakan.....	101
19. Hasil Uji regresi linear sederhana variabel pengaruh kesadaran Wajib pajak .....	103
20. Hasil Uji Regresi Linear Berganda untuk Pengaruh <i>e-filing</i> .....	105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model TAM.....	33
2. Hasil Uji Normalitas.....	94
3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	98



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian.....	126
2. Data Uji Validitas Butir Instrumen Dan Reliabilitas.....	131
3. Data Hasil Penelitian.....	136
4. Uji Validitas Data.....	145
5. Uji Reliabilitas Data.....	147
6. Uji Asumsi Klasik.....	148
7. Uji Hipotesis.....	150
8. Surat Ijin Penelitian.....	153

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut data [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah Wajib Pajak di Indonesia tahun 2014 sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini sekitar 28 juta orang, sementara yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2013 terdapat sekitar 20 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun, berdasarkan analisis Direktorat Jenderal Pajak, baru sekitar 5 juta perusahaan yang wajib membayar pajak.

Menurut data [jogja.tribunnews.com](http://jogja.tribunnews.com) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp900 triliun namun kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi baru mencapai Rp4,7 triliun.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh [ortax.org](http://ortax.org) jumlah pelapor SPT tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tren pelaporan SPT PPh dalam empat tahun terakhir. Hingga penutupan pelaporan SPT tanggal 31 maret 2015, Wajib Pajak yang menyerahkan SPT PPh orang pribadi jumlahnya tidak mencapai target 10 juta orang. Pada tahun 2012 jumlah pelaporan SPT 9,22 juta dari 17,65 juta wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2013 jumlah pelapor sebanyak 9,8 juta dari 17,73 Wajib Pajak yang terdaftar, sedangkan

pada tahun 2014 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 10,78 juta dari 18,35 Wajib Pajak yang terdaftar.

Penerimaan pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, hasil pungutan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak. Seperti yang dilansir dari [harianjogja.com](http://harianjogja.com), Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta terus menggenjot penerimaan pajak di tahun 2015. Langkah tersebut dilakukan agar target penerimaan pajak sebesar Rp.4,51 triliun tahun 2015 tercapai. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak DIY, realisasi penerimaan pajak per 25 Agustus 2015 berjumlah Rp.1,994 triliun atau 44,18% dari target 2015.

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak.

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara *e-SPT* dan *e-filing*. *E-SPT* adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam

selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan penggunaan menjadi penentu sebuah sistem diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut (Nurul Citra Noviandini, 2012).

Sistem *self assessment* adalah sebuah sistem yang memberikan tanggung jawab sendiri untuk wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terdapat kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Setiap Wajib

Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Menurut Nurmantu (2005:32) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Seperti yang dilansir dari [tribunjogja.com](http://tribunjogja.com), realisasi penerimaan pajak dari masyarakat Bantul di Kantor Pajak Pratama (KPP) Bantul pada tahun 2015 masih belum mencapai target. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak

tahun 2015 turun banyak dari tahun 2014. Tahun 2014 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 98% sedangkan untuk tahun 2015 hanya mencapai 85,5% dari target penerimaan pajak.

Berdasarkan data yang dilansir dari [ortax.org](http://ortax.org), Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan mengungkapkan hanya 20% masyarakat Indonesia yang taat membayar pajak sedangkan 80% masyarakat Indonesia harus di tegur atau dipaksa untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran pajak di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Pajak mengalami kendala dalam menagih pajak. Rasio pajak tahun 2014 hanya 12% terhadap produk domestik bruto. Rasio ini masih jauh dibandingkan dengan negara ekonomi menengah lainnya yang mencapai 19% dari produk domestik bruto.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurul Afia Sari (2013) memaparkan bahwa penerapan sistem *e-spt* meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun, penerapan sistem *e-SPT* tidak meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2014) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya perbedaan penelitian dan belum adanya penelitian yang meneliti tentang penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan E-Filing,**



## **Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak.
2. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT.
3. Jumlah Wajib Pajak di Indonesia sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun, hanya 23 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak tahun 2014.
4. Jumlah pelapor SPT tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tren pelaporan tren SPT PPh dalam empat tahun terakhir.
5. Pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015 di KPP Pratama Bantul Yogyakarta turun banyak dari tahun 2014 yaitu hanya mencapai 85,5% dari target penerimaan pajak sedangkan tahun 2014 98% dari target.
6. Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik.
7. Tingkat kepatuhan masih rendah meskipun banyak manfaat yang diperoleh dari sistem *e-filing*.
8. Masih ada Wajib Pajak yang belum mengerti bahkan tidak paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
9. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian yang didapatkan terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran hasil yang tidak diinginkan, maka penelitian ini menitikberatkan pada 4 (empat) variabel, yaitu: Penerapan *E-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

3. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
4. Pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

### b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima melalui *e-filing* untuk Wajib Pajak. Selain itu memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

### c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

### d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Perpajakan**

##### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Diana (2013:33) ada beberapa definisi pajak menurut para ahli antara lain: menurut Rochmat pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun menurut Djajadiningrat dalam Diana (2013:33) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Jadi berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan untuk memberikan iuran pada kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Negara dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum Negara.

#### **b. Pembagian Hukum Pajak**

Menurut Siti (2009:5) Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formil.

##### **1) Hukum Pajak Materil**

Hukum pajak meteril mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak, termasuk dalam hukum pajak materil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagih utama kepada fiskus.

##### **2) Hukum Pajak Formil**

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib

Pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparaturnya fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Akan tetapi, lama kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.

### **c. Jenis Pajak**

Menurut Siti (2009:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu: menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

#### **1) Menurut golongan**

Berdasarkan golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

## 2) Menurut sifat

Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

## 3) Menurut lembaga pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak Daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan



Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **d. Subjek Pajak**

Menurut Abdul Rahman (2010:30) subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012:33) yang menjadi subjek pajak antara lain:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha tetap

#### **e. Objek Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun menurut Abdul Rahman (2010:30) objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

**f. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau badan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak (Siti, 2009:22).

**g. Fungsi SPT**

Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- 3) Harta dan kewajiban
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) masa pajak yang ditentukan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku  
(Diana, 2013:193).

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung pajak terutang,
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
  - a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- 7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2011:57) yaitu:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

#### **b. Jenis Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Nurmantu (2005:149) kepatuhan dibagi menjadi 2 yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substatif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

### **c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

**d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rochmat (1991:94) faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1) Sanksi pajak

Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung mempunyai dampak pada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Sering kali penerapan sanksi administrasi secara tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Kesadaran pajak

Orang yang mempunyai kesadaran pajak (*tax consciousness*) yang besar akan lebih patuh dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak. Maka oleh sebab itu, disamping adanya sanksi baik sanksi administrative maupun

sanksi pidana sangat bermanfaat diadakannya penyuluhan yang efektif kepada masyarakat melalui berbagai media.

Adapun menurut Salamun (1990:190) faktor Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, berdasarkan kenyataan yang ada, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi.

Menurut Putri (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam melaporkan SPT antara lain:

1) *E-Filing*

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak

2) Pelayanan *Dropbox*

Pelayanan *dropbox* adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan. Sesuai dengan namanya, pelayanan *dropbox* berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP.

3) Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain



sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

#### 4) Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan Wajib Pajak merupakan pemahaman secara menyeluruh mengenai segala aturan perpajakan.

#### 5) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan keinginan secara sukarela untuk menjalankan kewajibannya. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi adalah kewajiban penyampaian SPT Tahunan.

### 3. Penerapan *e-filing*

#### a. Pengertian *e-Filing* dan *e-SPT*

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan pengertian diatas, *e-filing* adalah cara penyampaian SPT sedangkan *e-SPT* adalah media penyampaiannya (formulir).

## **b. Latar Belakang *e-filing***

Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

- 3) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan *e-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

**c. Dasar Hukum *E-Filing***

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai *e-filing* ini antara lain:

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

#### **d. Prosedur Penggunaan *e-filing***

- 1) Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan eFIN
  - a) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - b) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
  - c) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
  - d) Jika eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli dan dalam hal Pengusaha Kena

Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

## 2) Pendaftaran

- a) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: User ID dan Password, Aplikasi *e-SPT* (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.

## 3) Penyampaian *e-SPT* Secara *e-filing*

- a) Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.
- b) Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak.

**e. Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses *E-Filing***

**1) Bukti Transaksi *e-filing***

- a) Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
- b) Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP.

**2) Masa Pemberlakuan *e-filing***

- a) Penyampaian SPT secara *e-filing* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- b) SPT yang disampaikan secara *e-filing* pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

**3) Penyempurnaan *e-filing***

- a) Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ/2008, WP pengguna *e-filing* tidak perlu lagi menyampaikan *hardcopy* SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.
- b) Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian; dan 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara *e-filing* jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian.

- c) SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik, sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.
- d) Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
- e) Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT.

#### **f. Indikator *e-filing***

Indikator *e-filing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat dari penerapan *e-filing* dan *technology accepted model*.

##### **1) Kelebihan *e-filing***

Menurut [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) kelebihan *e-filing* antara lain:

- a) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24/7).
- b) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g) Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

## 2) *Technology Acceptance Model* (TAM)

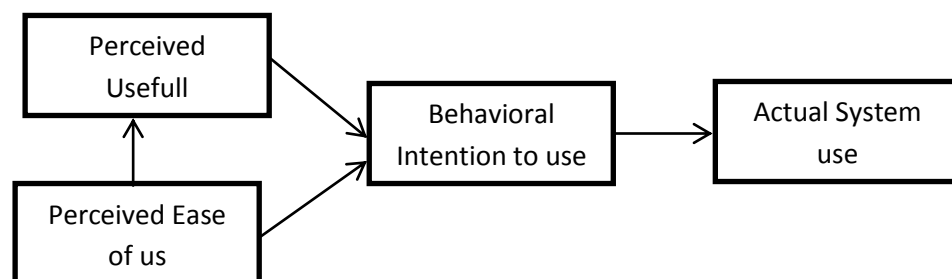
TAM yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred D. Davis pada tahun 1986, adalah adaptasi dari TRA yang dibuat khusus untuk pemodelan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. Menurut Davis (1989), tujuan utama TAM adalah memberikan dasar untuk penelusuran pengaruh faktor eksternal



terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna. TAM menganggap bahwa 2 keyakinan individual, yaitu persepsi manfaat (*perceived usefulness*, disingkat PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*, disingkat PEOU), adalah pengaruh utama untuk perilaku penerimaan komputer.

TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi. Sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi. Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan mempengaruhi penggunaan teknologi yang sesungguhnya. Pada umumnya pengguna teknologi akan memiliki persepsi positif terhadap teknologi yang disediakan. Persepsi negatif akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Artinya persepsi negatif berkembang setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna berpengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. Sehingga model TAM dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi.

Teori *technology acceptance model* (TAM) dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak orang pribadi terhadap teknologi administrasi Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* adalah teknologi administrasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. TAM akan digunakan sebagai indikator dalam kuesioner untuk mengetahui tanggapan wajib pajak dalam penerapan *e-filing*.



**Gambar 1. Model TAM**  
**Sumber Davis (1986)**

#### **4. Tingkat Pemahaman Perpajakan**

##### **a. Pengertian Pemahaman Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemarso (2007:2) pajak adalah perwujudan atas suatu kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

#### **b. Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan**

Indikator tingkat pemahaman perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan, antara lain:

##### **1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

###### **a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

###### **(1) Pengertian NPWP**

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## (2) Pendaftaran NPWP

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

## (3) Penghapusan NPWP

Menurut Isroah (2012:14) penghapusan NPWP adalah menghapuskan NPWP dari tata usaha kantor pelayanan pajak (KPP). Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Penghapusan NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak Dilakukan dengan syarat:

- (a) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib

Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(b) Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.

(c) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

(d) Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### b) Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan

Menurut Diana (2013:197) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan surat pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain:

##### (1) Mengambil SPT

Formulir harus diambil sendiri di tempat yang ditentukan oleh dirjen pajak.

##### (2) Mengisi

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata

uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor direktorat jenderal pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Menandatangani

SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

(4) Menyampaikan

Menyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap yang telah ditandatangani, dan disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak.

c) Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak

Adapun batas penyampaian SPT, menurut Diana (2013:199) sebagai berikut:

- (1) SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak kecuali untuk SPT masa PPh pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut oleh direktorat bea dan cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT masa PPh pasal 22, PPN, PPnBM, yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu melaporkan

beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

- (2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun pajak.

d) Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian habis (Diana, 2013:203). Pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT dengan syarat:

- (1) Wajib Pajak mengajukan surat permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.
- (2) Menyertai alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- (3) Wajib Pajak melampirkan surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- (4) Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang menurut perhitungan sementara.

- (5) Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum batas terakhir penyampaian SPT.
- (6) Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT diterbitkan surat teguran.

## 2) Sistem Perpajakan di Indonesia

Abdul Rahman (2010:22) menjelaskan bahwa Sistem perpajakan suatu Negara terdiri dari 3 unsur yaitu: *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak antara lain:

### a) *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang oleh seseorang).

### b) *Semi Self Assessment System*

*Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.



c) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung memperhitungkan menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

d) *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang.

### 3) Fungsi Perpajakan

Menurut Siti (2009:3) terdapat dua fungsi pajak, antara lain:

a) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak sebagai fungsi *budgetair* adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b) Fungsi *regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend* adalah pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### 4) Sanksi Perpajakan

##### a) Sanksi Tidak Mempunyai NPWP

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

##### b) Sanksi Keterlambatan dan/atau Tidak Menyampaikan SPT

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya dan sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan waib pajak badan, serta sebesar

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

c) Sanksi Keterlambatan dan/atau Tidak Membayar Pajak

Menurut undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 2a pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## **5. Kesadaran Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan; kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Menurut Abdul Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

Nasution (2006: 62) menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah

melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

#### **b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam self assessment system (Erly Suandy, 2002:95) antara lain:

##### **1) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)**

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

##### **2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)**

*Tax Mindedness* artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang.

## B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Nirawan Adiasa (2013) “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak memoderasi variabel pemahaman peraturan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut disebabkan para pegawai sebagai Wajib Pajak pada wilayah Semarang Barat rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang Wajib Pajak didalam kegiatan perpajakan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yaitu tingkat pemahaman perpajakan, variabel terikat yakni Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: subjek, objek, teknik pengambilan sampel, tempat dan waktu penelitian serta penambahan variabel bebas yaitu: penerepan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak.

2. Nofi Purnama Sari (2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e*-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)” .

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh Wajib Pajak badan yang terdaftar dan berada di wilayah kerja KPP Madya Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat, persepsi kegunaan dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Malang. Persepsi kemudahan kegunaan (*ease of use*) diketahui sebagai variabel bebas paling dominan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam model regresi linier berganda.

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada salah satu variabel bebas yaitu: penerapan SPT secara elektronik dan salah satu indikator kuesioner. Indikator kuesioner yang digunakan adalah penerapan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek, objek, variabel terikat, tempat dan waktu penelitian serta adanya penambahan variabel bebas yaitu tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Selain itu, terdapat penambahan indikator yang digunakan dalam pembuatan kuesioner yaitu manfaat *e-filing*.

3. Nurul Afia Sari (2013) “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (*e*-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara”.

Populasi dalam penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makasar Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar sejak tahun 2009. Pada tahun 2010, jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 26.257. Sedangkan untuk tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak, penerapan e-SPT ini tidak membawa banyak dampak. Hal ini terlihat dalam laporan tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2010 hingga awal semester 2012. Persentase tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak berfluktuasi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya persamaan variabel yaitu *e-SPT* dan Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: subjek, objek, metode pengambilan data, tempat dan waktu penelitian serta penambahan variabel bebas yaitu: tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Metode pengambilan data yang digunakan oleh penelitian yang relevan adalah pengambilan data sekunder sedangkan metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak.

4. Restu Mutmainah Marjan (2014) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”.



Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak. Pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yaitu kesadaran Wajib Pajak, variabel terikat yakni Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: subjek, objek, teknik pengambilan sampel, tempat dan waktu penelitian serta penambahan variabel bebas yaitu: penerepan *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan.

5. Sari Nurhidayah (2015) “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang telah menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yaitu penerapan *e-filing*, variabel terikat yakni Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: subjek, objek, tempat dan waktu penelitian serta penambahan variabel bebas yaitu: tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Selain itu, dalam penelitian Sari Nurhidayah terdapat variabel moderasi sedangkan dalam penelitian ini tidak terdapat variabel moderasi.

6. Sri Putri Tita Mutia (2014) “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)”.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha industri pribadi selaku Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP Pengusaha) di Kota Padang yang terdaftar di Departemen Perindustrian dan perdagangan (DEPERINDAG) kota Padang sampai tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tegas sanksi perpajakan, semakin baik kualitas pelayanan fiskus. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak. Selain itu terdapat persamaan pada variabel terikat yakni Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: subjek, objek, populasi, teknik pengambilan sampel, tempat dan waktu penelitian serta penambahan variabel bebas yaitu: penerapan *e-filing*. selain itu, terdapat perbedaan pada indikator kuesioner variabel kesadaran Wajib Pajak dan terdapat penambahan indikator pada variabel tingkat pemahaman perpajakan.

### **C. Kerangka Berpikir**

#### **1. Pengaruh *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP pratama Yogyakarta**

Sistem *e-filing* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja. Manfaat adalah tingkatan dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan

SPTnya. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Persepsi kemudahan merupakan tingkatan seseorang mempercayai bahwa menggunakan teknologi hanya memerlukan sedikit usaha. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-filing* memudahkannya, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Sebaliknya, jika Wajib Pajak menganggap bahwa sistem *e-filing* tidak memudahkan kinerjanya maka akan muncul sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem *e-filing* ini, ditujukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. Selain itu, dengan adanya sistem *e-filing* diharapkan dapat bermanfaat untuk Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem *e-filing* diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta**

Pemahaman perpajakan adalah suatu cara Wajib Pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan

yang berlaku diharapkan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun infrastruktur Negara.

Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran Wajib Pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang rendah akan memperbesar tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak maka hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, jika Wajib Pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya maka hal ini akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak diharapkan perlu memahami tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya sebagai warga Negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan diperkirakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **3. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah pengertian yang mendalam pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan. Pemahaman dari Wajib Pajak ini terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak karena Wajib Pajak merasa bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri Wajib Pajak itu sendiri.

Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak dan selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, jika kesadaran dari diri Wajib Pajak masih rendah untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap negatif Wajib Pajak yang selanjutnya akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak diperkirakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4. Pengaruh *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta**

Pajak adalah salah satu penerimaan pendapatan Negara terbesar. Pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak diperlukan Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem administrasi lebih sederhana dengan *e-filing*.

*E-filing* adalah salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan. *e-filing* dibuat agar memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. Penerapan *e-filing* ini diharapkan dapat memberikan manfaat, kemudahan dan kenyamanan untuk Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila Wajib Pajak merasa *e-filing* akan memudahkan dan bermanfaat untuknya. Begitu juga sebaliknya, Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun apabila Wajib Pajak merasa *e-filing* tidak bermanfaat dan tidak memudahkannya.

Tingkat pemahaman perpajakan adalah suatu tingkatan dimana Wajib Pajak mengerti kewajiban perpajakannya. Hal itu dikarenakan Wajib Pajak memahami bahwa pajak memberikan kontribusi penting kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman perpajakan

yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun apabila Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang rendah.

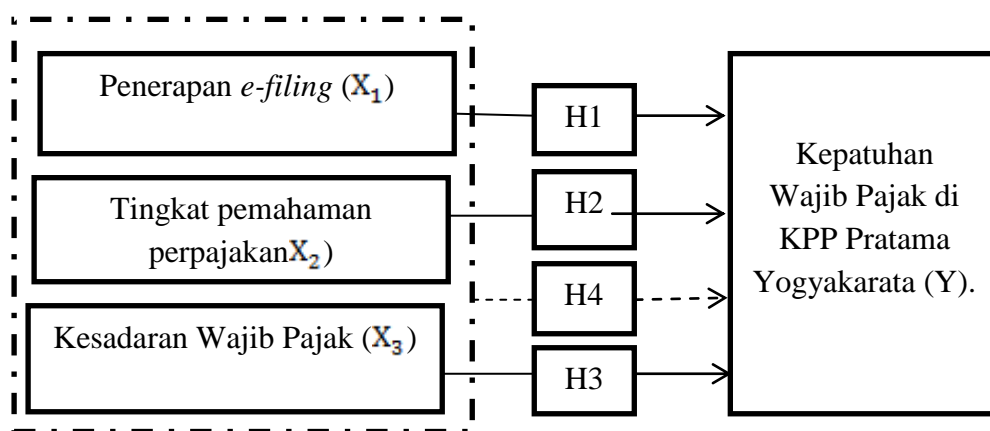
Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa dan menyadari bahwa tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik akan merugikan Negara. Wajib Pajak yang menyadari pentingnya pajak, secara sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Sebaliknya, Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang rendah dan sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

#### **D. Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan Sugiyono (2008:8).



Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan PPh di KPP Pratama Kota Yogyakarta (Y). variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filing* ( $X_1$ ), tingkat pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ). . Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. Paradigma Penelitian**

————> = Regresi linear sederhana  
 - - - - -> = Regresi linear berganda

### E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008:89). Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

H2: Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

H4: Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:152) metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional. Studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena, perhatian dan perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau yang lainnya (Uma Sekaran, 2007:158). Menurut Husein Umar (2011:25) penelitian korelasi adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam satu populasi. Disini peneliti dapat mengetahui berapa besar variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi.

#### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian bulan Desember 2015 hingga Januari 2016.

### C. Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Uma Sekaran, 2007:115). Adapun variabel dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua antara lain:

1. Variabel Terikat (*Dependence Variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
2. Variabel Bebas (*Independence Variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Varians variabel terikat ditentukan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak.

### D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:61) Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Teori mengekspresikan fenomena-fenomena secara sistematis melalui pernyataan hubungan antar variabel. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasi dalam *construct*.

Variabel dalam penelitian ini yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Indikator-indikator dalam variabel yang telah dijabarkan tersebut dikembangkan menjadi item pertanyaan dalam kuesioner yang menggunakan skala *Likert* dengan empat pilihan jawaban, antara lain: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Selain itu, terdapat pilihan jawaban Sangat Paham (SP), Paham (P), Tidak Paham (TP), dan Sangat Tidak Paham (STP).

Definisi operasional dari variabel-variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban

pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak antara lain:

- a. Kepatuhan Mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- d. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

## 2. Penerapan *e-filing* (X<sub>1</sub>)

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem *e-filing* bagi Wajib Pajak yaitu:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
- b. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
- c. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.

- d. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
- e. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- f. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Lima dari enam keuntungan tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran penerapan Sistem *e-filing*. Selain itu, persepsi kebermanfaatan, kepuasan penggunaan juga digunakan sebagai indikator untuk pengukuran *e-filing*.

### 3. Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ )

Tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Indikator tingkat pemahaman perpajakan antara lain:

- a. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- c. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
- d. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. Indikator kesadaran wajib pajak yaitu:

- a. Tingkat kedisiplinan dalam melakukan kewajiban perpajakan
- b. Keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan.

#### E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Nur Indirianto dan Bambang Supomo, 2009:115). Menurut Sugiyono (2008:61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sudah menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta. Pemilihan populasi tersebut karena Wajib Pajak tersebut pernah menggunakan *e-filing* sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta berjumlah 7.835 orang.



Sampel adalah meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009:115). Menurut Sugiyono (2008:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif karena yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan pendapat Gay. Menurut Husein Umar (2011:79) pendapat Gay menyatakan bahwa ukuran sampel yang dapat di terima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, dimana penelitian dengan metode deskriptif-korelasional memiliki ukuran sampel minimal 30 subjek. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 subjek.

#### **F. Teknik Pengambilan Data**

Data diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner pada responden. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:154) Kuesioner adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat disampaikan secara tertulis melalui kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab pada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Menurut Husein Umar (2011:49) teknik angket (kuesioner) merupakan suatu

pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

Pembagian kuesioner atau angket dilakukan oleh peneliti kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Sebelum pelaksanaan penelitian peneliti bermaksud untuk menjelaskan tujuan penelitian pada responden. Setelah responden mengerti tujuan, peneliti memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisian kuesioner. Responden diberikan waktu dan diminta untuk mengisi data sesuai dengan yang tercantum dalam kuesioner. Jika Wajib Pajak yang menjadi responden belum mengerti atau ada pertanyaan yang belum jelas maka dapat ditanyakan pada peneliti.

#### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Data diambil dari responden (Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta) menggunakan kuesioner dengan skala likert yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (Y), penerapan *e-filing* ( $X_1$ ), tingkat pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ). Skala *likert* berisi empat tingkat jawaban, berikut tabel skor Skala *Likert*:

**Tabel 1. Skor Skala Likert**

Jawaban		Skor
Sangat Setuju	Sangat Paham	4
Setuju	Paham	3
Tidak Setuju	Tidak Paham	2
Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Paham	1

**Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

NO	Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah
1	Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (Y)	Kepatuhan Mendaftarkan diri	1, 2	2
		Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	3, 4	2
		Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	5, 6	2
		Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	7, 8, 9	3
2	Penerapan <i>e-filing</i> ( $X_1$ )	Kecepatan Pelaporan SPT	1, 2, 3	3
		Penghematan biaya	4, 5	2
		Kecepatan perhitungan	6, 7, 8	3
		Kemudahan pengisian SPT	9, 10, 11	3
		Kelengkapan data pengisian SPT	12, 13, 14	3
		Lebih ramah lingkungan	15, 16, 17	3
		Persepsi kebermanfaatan	18, 19, 20	3
3	Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ )	Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1, 2, 3	3
		Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia	4, 5	2
		Pemahaman mengenai fungsi Perpajakan	6, 7, 8	3
		Pemahaman mengenai sanksi perpajakan	9, 11	2
4	Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ).	Tingkat kedisiplinan dalam melakukan kewajiban perpajakan	1, 2, 3	3
		Keinginan untuk melakukan kewajiban perpajakan	4, 5, 6	3

## H. Uji Coba Instrumen

Data yang digunakan dalam uji coba instrumen diambil dari Wajib Pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala likert yang untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (Y), penerapan *e-filing* ( $X_1$ ), tingkat pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ). Uji coba instrumen dilakukan dengan menyebarkan 30 kuesioner kepada wajib pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta.

### 1. Uji Validitas Data

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:182) Validitas data yang akurat ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Ada tiga pendekatan untuk mengukur validitas antara lain:

#### a. *Content (face) validity*

Salah satu konsep pengukuran validitas dimana suatu instrument dinilai memiliki *content validity* jika mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai dan representatif untuk mengukur *construct* sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Menurut Sugiyono (2008:353) secara teknik pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan

nomor butir (item) pernyataan atau pertanyaan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dan skor butir total, atau dengan mencari daya pembeda skor tiap item dari kelompok yang memberikan jawaban tinggi dan jawaban rendah.

b. *Criterion-related validity*

Konsep pengukuran validitas yang menguji tingkat akurasi dari instrumen yang baru dikembangkan. Uji *Criterion-related validity* dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara skor yang diperoleh dari penggunaan instrumen baru dengan skor dari pengguna instrumen lain yang telah ada sebelumnya yang memiliki instrumen yang relevan.

c. *Construct validity*

Konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah suatu instrumen mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Sugiyono (2008:352) untuk menguji validitas *construct* maka dapat digunakan pendapat dari ahli.

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas data peneliti menggunakan pendekatan *Content (face) validity*. Nilai validitas data dicari dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*. Perhitungan ini menggunakan bantuan komputer program SPSS 20. Perhitungan

dilakukan dengan menggunakan *Scale-reliability analysis* pada tabel *item total statistic* dengan *item corrected item total correlation* (Sugiyono dan Agus, 2015:388). Pertanyaan/ Pernyataan kuesioner dikatakan valid apabila nilai  $r_i > r$  tabel. Rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r_i = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2] [n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Keterangan:

$r_i$  = Koefisien korelasi product moment

$n$  = Jumlah responden

$X_i$  = Skor butir item tertentu

$Y_i$  = Skor total

$\sum X_i$  = Jumlah skor butir

$\sum Y_i$  = Jumlah skor total

$\sum X_i^2$  = Jumlah kuadrat skor butir

$\sum Y_i^2$  = Jumlah kuadrat skor total

Sugiyono (2008: 356)

Berikut ini adalah tabel hasil pengujian validitas butir instrumen SPPS

versi 20 :

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk kepatuhan wajib pajak**

Pernyataan	$r_i$	r tabel	Keterangan
1	0,889	0,361	Valid
2	0,889	0,361	valid
3	0,808	0,361	valid
4	0,887	0,361	valid
5	0,831	0,361	valid
6	0,813	0,361	valid
7	0,860	0,361	valid
8	0,874	0,361	valid
9	0,857	0,361	valid

Sumber: data primer yang diolah (2016)

Tabel 3 menunjukan bahwa korelasi *product moment* ( $r_i$ ) lebih besar dari r tabel untuk masing-masing item pernyataan pada variabel

Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Penerapan sistem *e-filing***

Pernyataan	$r_i$	r tabel	Keterangan
1	0,682	0,361	valid
2	0,720	0,361	valid
3	0,729	0,361	valid
4	0,675	0,361	valid
5	0,654	0,361	valid
6	0,717	0,361	valid
7	0,716	0,361	valid
8	0,595	0,361	valid
9	0,718	0,361	valid
10	0,818	0,361	valid
11	0,746	0,361	valid
12	0,640	0,361	valid
13	0,670	0,361	valid
14	0,807	0,361	valid
15	0,801	0,361	valid
16	0,646	0,361	valid
17	0,714	0,361	valid
18	0,773	0,361	valid
19	0,854	0,361	valid
20	0,863	0,361	valid
21	0,883	0,361	valid
22	0,851	0,361	valid
23	0,812	0,361	valid

Sumber: data primer yang diolah (2016)

Tabel 4 menunjukkan bahwa korelasi *product moment* ( $r_i$ ) lebih besar dari r tabel untuk masing-masing item pernyataan pada variabel penerapan *e-filing*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel penerapan *e-filing* dinyatakan valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk tingkat pemahaman perpajakan**

Pernyataan	$r_i$	r tabel	Keterangan
1	0,749	0,361	Valid
2	0,850	0,361	valid
3	0,836	0,361	valid
4	0,592	0,361	valid
5	0,535	0,361	valid
6	0,732	0,361	valid
7	0,743	0,361	valid
8	0,566	0,361	valid
9	0,700	0,361	valid
10	0,757	0,361	valid

Sumber: data primer yang diolah (2016)

Tabel 5 menunjukkan bahwa korelasi *product moment* ( $r_i$ ) lebih besar dari r tabel untuk masing-masing item pernyataan pada variabel tingkat pemahaman perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel tingkat pemahaman perpajakan dinyatakan valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk kesadaran Wajib Pajak**

Pernyataan	$r_i$	r tabel	Keterangan
1	0,726	0,361	Valid
2	0,753	0,361	valid
3	0,787	0,361	valid
4	0,674	0,361	valid
5	0,879	0,361	valid
6	0,714	0,361	valid

Sumber: data primer yang diolah (2016)

Tabel 6 menunjukkan bahwa korelasi *product moment* ( $r_i$ ) lebih besar dari r tabel untuk masing-masing item pernyataan pada variabel kesadaran Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel kesadaran Wajib Pajak dinyatakan valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.



## 2. Uji Reliabilitas Data

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:180) konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda. Pengukuran reliabilitas data menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu:

### a. Koefisien stabilitas

Proses pengujian stabilitas dikenal juga dengan *test-retest reability* pada dasarnya untuk mengetahui reliabilitas data berdasarkan stabilitas atau konsistensi jawaban responden. Salah satu metode statistik yang umumnya digunakan untuk mengukur koefisien stabilitas atau teknik *tes-retest* ini adalah *Pearson correlation*.

### b. Koefisien ekuivalensi

Pendekatan ini disebut juga dengan *alternate forms reability*. Peneliti melalui pendekatan ini menguji korelasi skor jawaban responden untuk mengetahui koefisien ekuivalensi antara skor jawaban dengan menggunakan instrumen pengukuran yang berbeda.

### c. Reliabilitas konsistensi internal

Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi diantara butir-butir pernyataan atau pertanyaan dalam suatu

instrumen. Untuk mengukur konsistensi internal, peneliti hanya memerlukan sekali pengujian dengan menggunakan teknik statistik terhadap skor jawaban responden yang dihasilkan dari penggunaan instrumen bersangkutan.

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas data, peneliti menggunakan pendekatan reliabilitas konsistensi internal. Untuk mengukur konsistensi internal peneliti menggunakan salah satu teknik statistik yaitu *Combarch's alpha*. Menurut Husein Umar (2011:173) suatu variabel dikatakan valid apabila nilai *Combarch's alpa* > 0,70. Perhitungan ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 20. Rumus *Combarch's alpha* sebagai berikut:

$$r_1 = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right\}$$

Dimana :

K = mean kuadrat antara subjek

$\sum s_i^2$  = mean kuadrat kesalahan

$s_t^2$  = varians total

Sugiyono (2008:365)

**Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

No	Variabel	<i>Cormbach's alpha</i>	Kriteria	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,965	0,7	Reliabel
2	Penerapan <i>E-filing</i>	0,967	0,7	Reliabel
3	Tingkat Pemahaman Perpajakan	0,892	0,7	Reliabel
4	Kesadaran Wajib Pajak	0,909	0,7	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah (2016)

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Combarch's alpa*  $> 0,70$  untuk masing-masing variabel dalam penelitian. Hal ini berarti jawaban dari responden mengenai data tersebut reliabel. Sehingga kuesioner (angket) dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

## I. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009:170). Menurut Sugiyono (2008:29) statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku umum.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang pernah menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain: Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (Y) sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filing* ( $X_1$ ), tingkat pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ).

## 2. Uji Prasyarat Analisis

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Menurut Imam Ghozali (2011:160) Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda berdistribusi normal atau tidak normal. Menurut Husein Umar (2011:181) untuk mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### b. Uji Linearitas

Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak (Imam Ghozali, 2011:166).

### c. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2011: 105) Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel *independence*. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi

terganggu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolonieritas. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Untuk bebas dari masalah multikolinieritas, nilai *tolerance* harus  $\leq 0,1$  dan nilai VIF  $\geq 10$ .

#### **d. Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain (Husein Umar, 2011:179). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut heteroskedastisitas.

### **J. Uji Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel (Sugiyono, 2008:84). Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana.

#### **1. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

a. Persamaan umum regresi linear sederhana

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

$\hat{Y}$  = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

(Sugiyono, 2008:261)

b. Menguji signifikan uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel bebas dengan satu variabel terikat yaitu dengan rumus:

$$t = \frac{r (\sqrt{n-2})}{\sqrt{1-r^2}}$$

keterangan:

t : t hitung

r : koefisien korelasi

n : jumlah sampel

(Husein Umar, 2011:132)

Harga t hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel berarti ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat secara individual. Sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari t tabel berarti tidak ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual.

## 2. Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu: *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

### a. Persamaan umum regresi linear berganda

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = Penerapan *e-filing*
- X<sub>2</sub> = Tingkat Pemahaman Perpajakan
- X<sub>3</sub> = Kesadaran Wajib Pajak

### b. Menguji Uji Signifikansi Simultan (Uji Stastik F)

Uji F hitung dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen yaitu: X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> secara simultan terhadap variabel dependen. Rumus uji F yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2004:23)

$$F_{reg} = \frac{R^2 (N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Keterangan :

- F<sub>reg</sub> = Harga F
- N = banyak sampel
- m = banyak prediktor
- R = koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Umum**

Sejak berdirinya kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta, munculah Kantor Pajak di Yogyakarta. Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, perubahan ini berlangsung sampai tahun 1986. Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta setiap tahun semakin meningkat seiring dengan banyaknya Wajib Pajak di Indonesia. Peningkatan Wajib Pajak memicu pergantian nama dari Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta menjadi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berkedudukan di Kota Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta beralamat di di jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta. Kantor yang ditempati oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Dr. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995. ilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah yaitu terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Luas wilayah KPP Pratama Yogyakarta adalah 32,50 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 397.398 jiwa atau sebanyak 86.629 KK bertempat tinggal di Kotamadya Yogyakarta, tingkat kepadatan



penduduk sekitar 13. 634 jiwa per km<sup>2</sup> yang menyebar di 45 kelurahan dengan 614 RW dan 2.523 RT.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta adalah “Menjadi instusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Sedangkan misi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta dalam rangka pencapaian visi adalah sebagai berikut: “Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pratama Yogyakarta
  - a. Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak.
  - b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para kepala seksi di KPP Pratama Yogyakarta.

## 2. Sub Bag Umum

- a. Menerima, memproses, menatausahakan dokumen yang masuk dan menyampaikan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mengkoordinasi penataan berkas arsip umum (non WP) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta agar dokumen dapat disimpan dengan baik, tertib dan aman serta memudahkan pencarian kembali.
- d. Mengusulkan diklat bagi pegawai, memproses izin sekolah di luar kedinasan.
- e. Memproses permohonan magang ataupun permohonan izin permintaan data dari mahasiswa.
- f. Melaksanakan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang tugas KPP.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggara administrasi DP3, LP2P, KP4 dan daftar riwayat hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- h. Menyusun laporan/daftar laporan Realisasi Anggaran Belanja, menyusun laporan SAKPA, melaksanakan penutupan buku kas umum.
  - i. Melaksanakan pengurusan Gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, permohonan uang duka wafat, permintaan dan pembayaran lembur, membuat surat pemberhentian gaji dan TKPKN serta merencanakan membuat program seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
  - j. Menyusun usaha pelelangan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - k. Mengkoordinasikan rencana penghapusan inventaris kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Seksi Pelayanan
- a. Melayani Wajib Pajak dalam pendaftaran dan pencetakan NPWP beserta SKT.
  - b. Melayani Wajib Pajak dalam urusan cetak masal STTS dan STTP.
  - c. Melayani Wajib Pajak dalam hal validasi PBB
  - d. Melayani Wajib Pajak dalam penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan mulai dari membuat tanda terima, menyerahkan tanda terima, merekam SPT, mencetak LPAD, dan mengirim SPT luar KPP melalui pos.

- e. Melayani Wajib Pajak dalam penerimaan SPT masa.
  - f. Memberikan pelayanan VAT refund kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
4. Seksi Ekstentifikasi
- a. Melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak.
  - b. Melakukan urusan penambahan jumlah Wajib Pajak.
  - c. Melakukan administrasi atas permohonan mutasi dan bea SPPT PBB
5. Seksi Pemeriksaan
- a. Mengkoordinasi pembuatan rencana pemeriksaan.
  - b. Mengkoordinasi pengusulan Wajib Pajak yang akan diperiksa.
  - c. Mengkoordinasi peminjaman berkas dan data pajak dari seksi pelayanan dan seksi PDI.
  - d. Mengkoordinasi penerbitan Surat Perintah Pemeriksa, Pajak Surat Pemberitahuan Pemeriksa Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksa Pajak.
  - e. Mengkoordinasikan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan nota perhitungan.
  - f. Mengkoordinasikan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaaan (DKHP) dan alat keterangan.
  - g. Mengkoordinasikan Penerbitan Surat Perintah Pengamatan
  - h. Mengkoordinasikan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka penangguhan pajak.

- i. Mengkoordinasikan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang dan permohonan SPT pajak patuh.

#### 6. Seksi Penagihan

- a. Pencairan tunggakan PPH, PPN, dan PBB.
- b. Mengadministrasikan surat masuk.
- c. Melakukan penyiapan surat teguran pajak.
- d. Melakukan tindakan penagihan aktif.
- e. Pembenahan/penataan berkas Wajib Pajak 100 besar.
- f. Konfirmasi tunggakan.
- g. Rekonsiliasi piutang pajak.

#### 7. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- b. Melakukan pengalihan potensi pajak dan mencari data untuk ekstenfikasi Wajib Pajak serta menyusun monografi pajak.

#### 8. Seksi Waskon ( Pengawasan dan Konsultan Wajib Pajak)

- a. Melakukan pengawasan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
- b. Pengamatan potensi perpajakan wilayah dan membantu KPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### 9. Kelompok Fungsional

- a. Kelompok fungsional penilai : menilai objek pajak milik objek pajak bumi dan bangunan.

- b. Kelompok fungsional pemeriksa : memeriksa kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan melayani Wajib Pajak untuk objek pajak yang melakukan keberatan setelah menerima surat keberatan.

## B. Deskripsi Data Khusus

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Peneliti menyebarkan 105 kuesioner (angket) tetapi hanya 72 kuesioner (angket) yang kembali dan terdapat 2 kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap.

**Tabel 8. Pembagian Kuesioner (angket)**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	105	100%
Kuesioner yang tidak kembali	33	31,4%
Kuesiner yang tidak diisi dengan lengkap	2	1,9%
Kuesioner yang digunakan	70	66,7%

Sumber: data primer yang diolah (2016)

Penelitian ini dihasilkan dari hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan variabel yang diteliti. Variabel tersebut antara lain: Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta (Y), penerapan *e-filing* ( $X_1$ ), tingkat pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena, perhatian dan perspektif seseorang,

organisasi, orientasi industri atau yang lainnya (Sekaran, 2007:158). Analisis data statistik deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga rerata Mean (M), Modus (Mo), Median (Me), dan Standar Deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata, modus merupakan nilai variabel atau data yang mempunyai frekuensi tinggi dalam distribusi. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian:

**Tabel 9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Modus	Median	Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	70	18	36	30,8	27	30	4,299
Penerapan <i>e-filing</i>	70	57	92	80.31	69	83	10.140
Tingkat Pemahaman Perpajakan	70	26	40	34.47	40	35	4.373
Kesadaran wajib pajak	70	14	24	20.73	24	22	2.909

Sumber: data primer yang diolah (2016)

Menurut Sugiyono (2012:34) ada beberapa langkah yang digunakan untuk menyajikan tabel distribusi frekuensi, antara lain:

- a. Mengitung jumlah kelas interval

Jumlah kelas interval dapat dihitung menggunakan rumus Sturges.

Rumus sturges sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Dimana:

K = Jumlah Kelas Interval  
n = Jumlah Data Observasi  
log = Logaritma

b. Menghitung rentang data

Perhitungan rentang data dilakukan dengan mengurangi data yang terbesar dengan data yang terkecil kemudian ditambah 1.

c. Menghitung panjang kelas

Perhitungan panjang kelas dilakukan dengan cara rentang data dibagi dengan jumlah kelas.

d. Menyusun interval kelas

Penyusunan kelas interval dilakukan dengan cara menyusun data dari yang terkecil ke data yang terbesar.

**a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak antara lain: 1) Kepatuhan Mendaftarkan diri, 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, 4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Dari empat indikator yang telah dijabarkan tersebut, peneliti membuat 9 pernyataan. Penentuan skor menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) sangat tidak setuju (STS). Penentuan



skor diberikan dari nilai 4 untuk Sangat setuju sampai 1 untuk sangat tidak setuju. Data hasil analisis statistik deskripsi sebelumnya, didapatkan nilai maksimum 36 sedangkan nilai minimum 18.

Menghitung jumlah kelas interval dilakukan dengan menggunakan rumus Stugres.

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 \log 70$$

$$K = 7,08 \text{ (atau dibulatkan menjadi 7)}$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung rentang data.

Perhitungan rentang data penelitian sebagai berikut:

$$\text{Rentang data} = (\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}) + 1$$

$$\text{Rentang data} = (36 - 18) + 1$$

$$\text{Rentang data} = 19$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung panjang kelas.

Perhitungan panjang kelas pada variabel kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

$$\text{Panjang kelas} = \text{Rentang data} / \text{Jumlah kelas}$$

$$\text{Panjang kelas} = 19 / 7$$

$$\text{Panjang kelas} = 2,7143 \text{ (atau dibulatkan menjadi 3)}$$

**Tabel 10. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	17 – 19	1	1,5%
2	20 – 22	0	0%
3	23 – 25	1	1,5%
4	26 – 28	29	42%
5	29 – 31	8	12%
6	32 – 34	7	10%

7	35 – 37	23	33%
Jumlah		70	100

Sumber: data primer yang diolah (2016)

#### b. Penerapan *E-Filing* ( $X_1$ )

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Indikator yang digunakan dalam variabel penerapan *e-filing* antara lain: 1) Kecepatan Pelaporan SPT; 2) Penghematan biaya; 3) Kecepatan perhitungan; 4) Kemudahan pengisian SPT; 5) Kelengkapan data pengisian SPT; 6) Lebih ramah lingkungan; 7) persepsi kebermanfaatan; 8) kepuasan penggunaan. Dari 8 (delapan) indikator yang telah dijabarkan tersebut, peneliti membuat 23 pernyataan. Penentuan skor menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) sangat tidak setuju (STS). Penentuan skor diberikan dari nilai 4 untuk Sangat setuju sampai 1 untuk sangat tidak setuju. Data hasil analisis statistik deskripsi sebelumnya, didapatkan nilai maksimum 92 sedangkan nilai minimum 57.

Menghitung jumlah kelas interval dilakukan dengan menggunakan rumus Stugres.

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 \log 70$$

$$K = 7,08 \text{ (atau dibulatkan menjadi 7)}$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung rentang data. Perhitungan rentang data penelitian sebagai berikut:

$$\text{Rentang data} = (\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}) + 1$$

$$\text{Rentang data} = (92 - 57) + 1$$

$$\text{Rentang data} = 36$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung panjang kelas. Perhitungan panjang kelas pada variabel penerapan *e-filing* sebagai berikut:

$$\text{Panjang kelas} = \text{Rentang data} / \text{Jumlah kelas}$$

$$\text{Panjang kelas} = 36 / 7$$

$$\text{Panjang kelas} = 5,142857 \text{ (atau dibulatkan menjadi 5)}$$

**Tabel 11. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan *e-filing***

No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	57 – 61	2	2,9%
2	62 – 66	3	4,2%
3	67 – 71	14	20%
4	72 – 76	11	15,7%
5	77 – 81	1	1,5%
6	82 – 86	11	15,7%
7	87 – 92	28	40%
Jumlah		70	100

Sumber: data primer yang diolah (2016)

**c. Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ )**

Tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan

dan kemakmuran. Indikator tingkat pemahaman perpajakan antara lain: 1) Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pemahaman mengenai fungsi perpajakan; 4) Pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Dari 4 (empat) indikator yang telah dijabarkan tersebut, peneliti membuat 10 pernyataan. Penentuan skor menggunakan skala likert dengan pilihan sangat paham (SP), paham (P), tidak paham (TP) dan sangat tidak paham (STP). Penentuan skor diberikan dari nilai 4 untuk sangat paham sampai 1 untuk sangat tidak paham. Data hasil analisis statistik deskripsi sebelumnya, didapatkan nilai maksimum 40 sedangkan nilai minimum 26.

Menghitung jumlah kelas interval dilakukan dengan menggunakan rumus Stugres.

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 \log 70$$

$$K = 7,08 \text{ (atau dibulatkan menjadi 7)}$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung rentang data.

Perhitungan rentang data penelitian sebagai berikut:

$$\text{Rentang data} = (\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}) + 1$$

$$\text{Rentang data} = (40 - 26) + 1$$

$$\text{Rentang data} = 15$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung panjang kelas. Perhitungan panjang kelas pada variabel tingkat pemahaman perpajakan sebagai berikut:

$$\text{Panjang kelas} = \text{Rentang data} / \text{Jumlah kelas}$$

$$\text{Panjang kelas} = 15 / 7$$

$$\text{Panjang kelas} = 2.142857 \text{ (atau dibulatkan menjadi 2)}$$

**Tabel 12. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan**

No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	26 – 27	3	4,3%
2	28 – 29	6	8,6%
3	30 – 31	14	20%
4	32 – 33	7	10%
5	34 – 35	8	11,4%
6	36 – 37	6	8,6%
7	38 – 40	26	37,1%
Jumlah		70	100

Sumber: data primer yang diolah (2016)

#### **d. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )**

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. Indikator kesadaran Wajib Pajak yaitu: 1) Tingkat kedisiplinan dalam melakukan kewajiban perpajakan; 2) Keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Dari 2 (dua) indikator yang telah dijabarkan tersebut, peneliti membuat 6 pernyataan. Penentuan

skor menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Penentuan skor diberikan dari nilai 4 untuk Sangat setuju sampai 1 untuk sangat tidak setuju. Data hasil analisis statistik deskripsi sebelumnya, didapatkan nilai maksimum 24 sedangkan nilai minimum 14.

Menghitung jumlah kelas interval dilakukan dengan menggunakan rumus Stuges.

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 \log 100$$

$$K = 7,08 \text{ (atau dibulatkan menjadi 7)}$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung rentang data.

Perhitungan rentang data penelitian sebagai berikut:

$$\text{Rentang data} = (\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}) + 1$$

$$\text{Rentang data} = (24 - 14) + 1$$

$$\text{Rentang data} = 11$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung panjang kelas.

Perhitungan panjang kelas pada variabel kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:

$$\text{Panjang kelas} = \text{Rentang data} / \text{Jumlah kelas}$$

$$\text{Panjang kelas} = 11 / 7$$

$$\text{Panjang kelas} = 1,57143 \text{ (atau dibulatkan menjadi 1,5)}$$

**Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

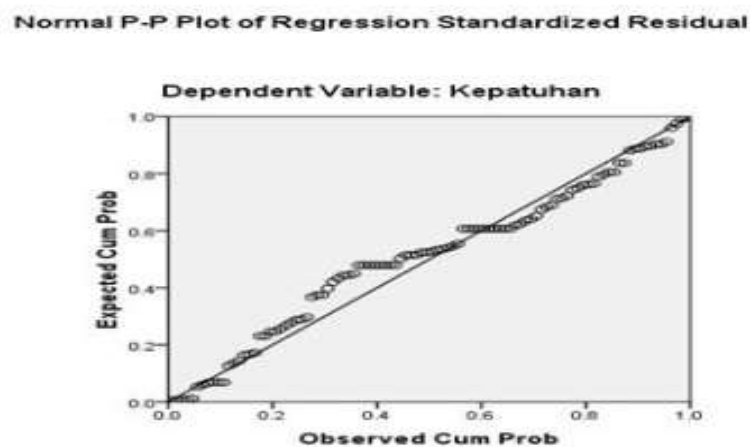
No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	14 - 15,5	3	4,3%
2	15,6 - 17,1	5	7,1%
3	17,2 – 18,7	18	25,7%
4	18,8 – 20,3	8	11,5%
5	20,4 – 21,9	0	0%
6	22 – 23,5	17	24,3%
7	23,6 – 25,1	19	27,1%
Jumlah		70	100

Sumber: data primer yang diolah (2016)

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

**Gambar 8. Hasil Uji Normalitas**

Gambar diatas merupakan Hasil dari pengolahan data uji normalitas dengan program SPSS Versi 20. Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi

normalitas. Selain menggunakan grafik normal plot, pengujian normalitas didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Uji K-S ini dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal.

Berikut ini adalah hasil dari uji statistik non-parametrik K-S:

**Tabel 14. Uji Statistik Non-Parametrik *Kolmogrov-Smirnov* untuk Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.62392124
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.057
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.191
Asymp. Sig. (2-tailed)		.117
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: data primer yang diolah , Lampiran (2016)

Besarnya nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah 1,191 dan signifikan pada  $0,117 > \alpha$  (nilai  $\alpha$  adalah 5%). Hal ini menunjukkan bahwa Ho: Data residual berdistribusi normal diterima.

#### b. Uji Linearitas

Hasil pengolahan data uji linearitas dengan program SPSS Versi 20 adalah sebagai berikut:



**Tabel 15. Hasil Uji Linearitas**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 <sup>a</sup>	.651	.641	2.665	1.802

a. Predictors: (Constant), E-Filling, Pemahaman Pajak, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer yang diolah, Lampiran (2016)

Dalam pengujian linearitas ini menggunakan uji *Lagrange Multiplier*. Menurut Imam Ghozali (2011: 169), uji *Lagrange Multiplier* merupakan uji alternatif dari *Ramsey test* dan dikembangkan oleh Engle tahun 1982. Estimasi dengan uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai *chi-square* hitung atau ( $n \times R^2$ ). Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,651 dengan jumlah  $n$  penelitian 70, maka besarnya nilai *chi-square* hitung  $= 70 \times 0,651 = 45,57$ . Nilai ini dibandingkan dengan  $c_2$  tabel dengan  $df = 70$  dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai *chi-square* tabel sebesar 90.53123. Oleh karena nilai *chi-square* hitung lebih kecil dari *chi-square* tabel maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berbentuk linear.

### c. Uji Multikolinearitas

Hasil pengolahan data uji multikolinearitas dengan program SPSS Versi 20 adalah sebagai berikut:

**Tabel 16. Hasil Uji Multikolinearitas**Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
E-Filing	.420	2.381
Pemahaman Perpajakan	.398	2.515
Kesadaran Wajib Pajak	.382	2.616

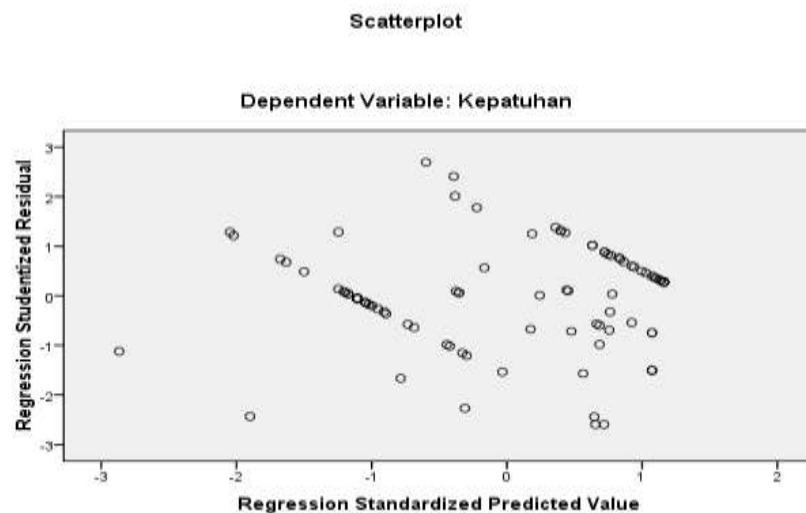
a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data yang diolah, Lampiran (2016)

Dari data di atas menunjukkan bahwa *output* perhitungan nilai *Tolerance* dari tiga variabel independen (*E-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak) mempunyai nilai masing-masing 0.420, 0.398, dan 0.382 adalah lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

#### d. Uji heteroskedastisitas

Hasil pengolahan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS Versi 20 adalah sebagai berikut:



**Gambar 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu titik-titik pada scatterplot menyebar diatas dan dibawah atau disekitar 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan variabel independen Penerapan *e-filing*, Tingkat pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.

## 2. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas

terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis I, hipotesis II dan hipotesis III. Sedangkan analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis ke IV.

#### a. Uji Hipotesis I

Hipotesis Pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil perhitungan hipotesis pertama sebagai berikut:

**Tabel 17. Hasil Uji regresi linear sederhana untuk pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	r <sup>2</sup>	t hitung	t tabel			
0,674	0,454	9,033	1,66	0.000	7,427	0,293

Sumber: data primer yang diolah (2016)

#### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 17 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 7,427 dan koefisien regresi *e-filing* terhadap Kepatuhan sebesar 0,293. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 7,427 + 0,293 x_1$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel *e-filing* dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan akan naik sebesar 7,427. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika variabel *e-filing* naik sebesar

satu poin, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,293. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2) Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 17 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,454. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta dipengaruhi oleh 45,4% variabel penerapan *e-filing*.

## 3) Pengujian signifikansi regresi sederhana

Berdasarkan Tabel 17 di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 9,033. Jika dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,66, maka nilai  $t$  hitung lebih besar dari pada  $t$  tabel ( $9,033 > 1,66$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel penerapan *e-filing* terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Penerapan *e-filing*

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.” diterima.

## b. Uji Hipotesis II

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil perhitungan hipotesis kedua sebagai berikut:

**Tabel 18. Hasil Uji regresi linear sederhana untuk pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	r <sup>2</sup>	t hitung	t tabel			
0,666	0,444	8,848	1,66	0.000	8,380	0,653

Sumber: data primer yang diolah (2016)

### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 18 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 8,380 dan koefisien regresi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,653. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :  $Y = 8,380 + 0,653 x_2$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Pemahaman Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 8,380. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika variabel Pemahaman Perpajakan naik sebesar satu poin, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,653. Nilai

koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2) Koefisien Determinasi**

Berdasarkan Tabel 18 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,444. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta dipengaruhi oleh 44,4% variabel tingkat Pemahaman Perpajakan.

## **3) Pengujian signifikansi regresi sederhana**

Berdasarkan Tabel 18 di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 8,848. Jika dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,66, maka nilai  $t$  hitung lebih besar dari pada  $t$  tabel ( $8,848 > 1,66$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ . Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”  
diterima.

### c. Uji Hipotesis III

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil perhitungan hipotesis ketiga sebagai berikut:

**Tabel 19. Hasil Uji regresi linear sederhana untuk pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	r <sup>2</sup>	t hitung	t tabel			
0,788	0,621	12,664	1,66	0.000	6,373	1,184

Sumber: data primer yang diolah (2016)

#### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 19 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 6,373 dan koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,184. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,373 + 1,184 x_3$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 6,373. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar satu poin, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 1,184. Nilai



koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2) Koefisien Determinasi**

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,621. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Yogyakarta dipengaruhi oleh 62,1% variabel Kesadaran Wajib Pajak.

## **3) Pengujian signifikansi regresi sederhana**

Berdasarkan Tabel 19 di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 12,664. Jika dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,66, maka nilai  $t$  hitung lebih besar dari pada  $t$  tabel ( $12,664 > 1,66$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ . Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib

Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta” diterima.

#### d. Uji Hipotesis IV

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil perhitungan hipotesis keempat sebagai berikut:

**Tabel 20. Hasil Uji Regresi Linear Berganda untuk Pengaruh *e-filing*, Pemahaman Pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Independen	Nilai r		Nilai F		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
	r Hitung	r <sup>2</sup>	F hitung	F tabel			
Penerapan <i>e-filing</i>	0,807	0,651	59.820	3,94	0,000	2,724	0,079
Pemahaman perpajakan							0,119
Kesadaran Wajib Pajak							0,854

Sumber: data primer yang diolah (2016)

#### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 20 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 2,724 dan koefisien regresi penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masing - masing sebesar 0,079; 0,119; dan 0,854. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,724 + 0,079 x_1 + 0,119 x_2 + 0,854 x_3$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui:

- a) Nilai konstanta 2,724 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak maka nilai variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,724.
- b) Nilai koefisien regresi penerapan *e-filing* sebesar 0,079 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin pada variabel penerapan *e-filing* (variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Waib Pajak dianggap konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,079.
- c) Nilai koefisien regresi Tingkat Pemahaman Perpajakan sebesar 0,119 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin pada variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (variabel Penerapan *e-filing* dan Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,119.
- d) Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,854 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak (variabel Penerapan *e-filing* dan Tingkat

pemahaman Perpajakan dianggap konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,854.

## 2) Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 20 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi ganda ( $r^2$ ) sebesar 0,651. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel dipengaruhi oleh 65,1% variabel Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.

## 3) Pengujian signifikansi regresi sederhana

Berdasarkan Tabel 20 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 59.820. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 3,94, maka nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel ( $59.820 > 3,94$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada tabel 20 di atas menunjukkan bahwa pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Penerapan *e-filing*,

tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta” diterima.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Nilai  $t$  hitung untuk variabel penerapan *e-filing* sebesar 9,033. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel yaitu 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,293 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,674 dan koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,454 menunjukkan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 45,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lain di luar penelitian ini mempengaruhi sebesar 54,6%. Penerapan *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi penerapan ini tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan penerapan *e-filing* merupakan salah satu upaya yang dilakukan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sari Nurhidayah (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah dinyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana *e-filing* ini dimoderasi oleh pemahaman Wajib Pajak dalam menggunakan internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *E-Filing* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat, lebih mudah dan kapan saja. Hal ini berarti Wajib Pajak dapat melaporkan SPT saat memiliki waktu luang tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak. Penerapan *e-filing* dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Wajib Pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing* akan membentuk sikap positif dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

## **2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Nilai  $t$  hitung untuk variabel penerapan tingkat pemahaman perpajakan sebesar 8,848. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel yaitu 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,653 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik.

Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,666 dan koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,444 menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 44,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lain di luar penelitian ini mempengaruhi sebesar 66,6%. Tingkat pemahaman perpajakan memberikan pengaruh signifikan tetapi pengaruh ini tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman perpajakan setiap Wajib Pajak berbeda-beda

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013) yang berjudul

“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang Barat, sedangkan preferensi risiko tidak memoderasi variabel pemahaman peraturan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang mengerti tentang ketentuan perpajakan seperti sistem perpajakan, prosedur perpajakan dan sanksi perpajakan akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

### **3. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan



nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Nilai  $t$  hitung untuk variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 12,664. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel yaitu 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 1,184 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik.

Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,788 dan koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,621 menunjukkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 62,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lain di luar penelitian ini mempengaruhi sebesar 37,9%. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh signifikan tetapi penerapan ini tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran setiap Wajib Pajak berbeda-beda.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Restu Mutmainah Marjan (2014) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Restu Mutmainah Marjan dinyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib

Pajak. Sanksi Pajak pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

#### **4. Pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai F hitung adalah sebesar 59.820. Nilai ini lebih besar dari F tabel yaitu 3,94 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000

lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi untuk variabel penerapan *e-filing* sebesar 0,293, variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar 0,653 sedangkan variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,184 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik.

Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,807 dan koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,651 menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 65,1% Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lain di luar penelitian ini mempengaruhi sebesar 34,9%. Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh signifikan namun, masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung pernyataan dari Rochmat (1991:94) dan Salamun (1990:190) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2014) yang berjudul “pengaruh sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah menyatakan bahwa sistem

*e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian juga menolak hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari (2013) yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari (2013) menyatakan bahwa penerapan e-spt tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penerapan *e-filing* dilihat dari seberapa baik persepsi Wajib Pajak tentang *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa tinggi Wajib Pajak mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa tinggi kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang merasa puas menggunakan *e-filing*, memahami dengan baik peraturan perpajakan dan memiliki kedisiplinan juga kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan membuat Wajib Pajak tersebut semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

### **E. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini telah dilakukan dan diusahakan dengan benar dan sesuai dengan pedoman ilmiah. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Agar diperoleh hasil yang lebih baik, berikut ini beberapa keterbatasan dalam penelitian:

1. Adanya kerahasiaan data Wajib Pajak menyebabkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *incidental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi siapa saja yang ditemui dapat dijadikan sampel asal memenuhi kriteria peneliti.
2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadinya bias. Kemungkinan terjadi bias disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
3. Jumlah sampel dalam penelitian ini dirasa kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,293. Nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu  $9,033 > 1,66$ . Koefisien determinasi 0,454 ini berarti penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Besarnya nilai koefisien regresi 0,293 dengan nilai konstanta 7,427. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 7,427 + 0,293X_1$ . Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan *e-filing* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,653. Nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu  $8,848 > 1,66$ . Koefisien determinasi 0,444 berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 44,4%. Besarnya nilai koefisien regresi 0,653 dengan nilai konstanta 8,380.

Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 8,830 + 0,653X_2$ . Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,184. Nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu  $12,664 > 1,66$ . Koefisien determinasi 0,621 berarti kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 62,1%. Besarnya nilai koefisien regresi 1,184 dengan nilai konstanta 6,373. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 6,373 + 1,184X_3$ . Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,293 untuk variabel penerapan *e-filing*, sebesar 0,653 untuk variabel tingkat pemahaman perpajakan sedangkan variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,184. Nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu  $59,820 > 3,94$ . Koefisien determinasi 0,651 hal ini berarti penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 65,1%. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,293 untuk variabel penerapan *e-filing*, sebesar 0,653 untuk variabel

tingkat pemahaman perpajakan dan sebesar 1,184 untuk variabel kesadaran Wajib Pajak dengan nilai konstanta 2,724. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 2,724 + 0,293X_1 + 0,653X_2 + 1,184X_3$ . Hal ini berarti semakin tinggi penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden untuk butir pernyataan variabel *e-filing* pada item kemudahan pengisian SPT bagi pemula.
2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem *e-filing* karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan *e-filing*.
3. Penyuluhan pajak perlu ditingkatkan dan difokuskan tentang sanksi perpajakan, karena dalam penelitian ini pernyataan mengenai sanksi perpajakan memiliki rata-rata skor terendah dalam variabel tingkat pemahaman perpajakan.
4. Tingkat kedisiplinan Wajib Pajak perlu ditingkatkan dengan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara karena skor



pernyataan mengenai kedisiplinan membayar pajak pada variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki skor terendah dalam penelitian ini.

5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat.
6. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel *e-filing* sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar didapatkan perbandingan hasil penerapan *e-filing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Anonim. (2014). "Lebih Dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak". Diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141014175233-78-6372/lebih-dari-50-wajib-pajak-belum-bayar-pajak/> tanggal 09 November 2015, jam 09.36 WIB.
- \_\_\_\_\_. (2014). "Kesadaran Pajak Orang Indonesia Rendah, 80 Persen Harus Dipaksa". Diakses melalui <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=13751&q=&hl m=> tanggal 31 Maret 2016, jam 11.00 WIB.
- \_\_\_\_\_. (2015). "Bulan Kedelapan Penerimaan DIY Belum 50%". Diakses melalui [www.harianjogja.com/read/20150826/7/3476/bulan-kedelapan-penerimaan-pajak-diy-belum-50](http://www.harianjogja.com/read/20150826/7/3476/bulan-kedelapan-penerimaan-pajak-diy-belum-50) Pada tanggal 17 september 2015, jam 09.32 WIB.
- \_\_\_\_\_. (2015). "Pelajari dan Pahami Sebelum Memilih Terpisah". Diakses melalui <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=70> Pada tanggal 22 febuari 2016, jam 17.18 WIB.
- \_\_\_\_\_. (2015). "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah". Diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-perorangan-masih-rendah> tanggal 08 November 2015, jam 16.40 WIB.
- \_\_\_\_\_. (2015). "Wajib Pajak Tak Patuh, Jumlah Pelaporan SPT PPh 2015 Anjlok". Diakses melalui <http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14055&q=&hlm=> tanggal 08 November 2015, jam 15.36 WIB.
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2004). "E-SPT". Diakses melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pada tanggal 15 September 2015 jam 16.28 WIB.
- \_\_\_\_\_. (2004). "Apa itu *e-filing*". Diakses melalui [www.pajakku.com/index.asp?module=information&task=detail&title=InfoeFiling](http://www.pajakku.com/index.asp?module=information&task=detail&title=InfoeFiling) pada tanggal 15 September 2015, Jam 16.30 WIB.
- Djoko Muljono. (2007). *Pengantar PPh Dan PPh 21 Lengkap Dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gita Govinda Kirana. (2010). “Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filling* (Kajian Empiris Di Wilayah Kota Semarang)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir. (2005). “Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Tunggal*. Vol. 10, No. 2.
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Undip.
- Isroah. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Uny Press.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nirawan. (2013). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Novi Purnama Sari.(2014). “Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)”. *Skripsi*. Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 29/PMK.03/2015 tentang “Pengurangan dan Penghapusan Administrasi Pajak atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak”.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 91/PMK.03/2015 tentang “Pengurangan atau Penghapusan Administrasi Pajak atas Keterlambatan Penyampaian Suatu Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak”.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang “Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak”.

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang “Pajak Penghasilan”.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”.
- Riza Anvillia Putri (2015). “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kepanjen)”. *Journal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 3, No. 2.
- Restu Mutmainah Marjan. (2014). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
- Rochmat Soemitro. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.
- Safrin Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Sari Nurhidayah. (2015). “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Salamun A.T. (1990). *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Septia Deni. (2015). “Wajib Pajak Harus Lunasi Kewajiban Tahun Ini”. Diakses melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/2303156/wajib-pajak-harus-lunasi-kewajiban-di-tahun-ini> Pada tanggal 24 November, jam 05.00 WIB.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. (2007). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Putri Tita Mutia (2014) “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)”. *Journal Akuntansi*. Vol. 2, No. 1.
- Sugiyono. (2008). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono & Agus Susanto. (2015). *Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sutrisno Hadi. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Uma Sekaran. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden Wajib Pajak

Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Melalui kesempatan ini, perkenalkan saya Wulandari Agustiningsih, mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”**. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. **Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum.** Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,



Wulandari Agustiningsih

### Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta.
2. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, pengetahuan pajak dan lama menggunakan *e-filing*.
3. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
4. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

\*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

SS	Sangat Setuju	SP	Sangat Paham
S	Setuju	P	Paham
TS	Tidak Setuju	TP	Tidak Paham
STS	Sangat Tidak Setuju	STP	Sangat Tidak Paham

### Identitas Responden:

1. Nama Bapak/Ibu : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
3. Umur : tahun
4. Pendidikan Terakhir :
 

<input type="checkbox"/> SMA	<input type="checkbox"/> Magister (S2)
<input type="checkbox"/> Diploma	<input type="checkbox"/> Lainnya.....
<input type="checkbox"/> Sarjana	
5. Jenis Pekerjaan :
 

<input type="checkbox"/> Karyawan	<input type="checkbox"/> Wirausaha
<input type="checkbox"/> Lainnya....	
6. Pengetahuan Pajak :
 

<input type="checkbox"/> Brevet	<input type="checkbox"/> Tidak ada
<input type="checkbox"/> Penyuluhan Pajak	<input type="checkbox"/> Lainnya.....
7. Sudah menggunakan *e-filing* :
 

<input type="checkbox"/> < 1 Tahun	<input type="checkbox"/> 1-3 Tahun	<input type="checkbox"/> > 3 Tahun
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



### KUESIONER MENGENAI PENERAPAN SISTEM *E-FILING*

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> , saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang.				
2	Dengan diterapkan <i>e-filing</i> saya dapat melaporkan SPT dimana pun saya berada ketika saya terhubung dengan internet				
3	Sistem <i>e-filing</i> dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat saat saya melaporkan SPT				
4	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak				
5	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya				
6	Dengan diterapkan <i>e-filing</i> perhitungan pajak saya lebih cepat				
7	Sistem <i>e-filing</i> memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak				
8	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> perhitungan pajak saya lebih akurat				
9	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan				
10	Sistem <i>e-filing</i> mudah untuk dipelajari bagi pemula				
11	Sistem <i>e-filing</i> memudahkan saya dalam melakukan pengisian SPT				
12	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> data yang saya sampaikan selalu lengkap				
13	Dalam sistem <i>e-filing</i> terdapat validasi pengisian SPT				
14	Saya merasa tenang karena data saya selalu lengkap saat menggunakan <i>e-filing</i>				
15	Saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran dengan diterapkannya <i>e-filing</i>				
16	Sistem <i>e-filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.				
17	Sejak menggunakan <i>e-filing</i> saya tidak perlu menggunakan banyak kertas untuk pelaporan perpajakan.				
18	Sistem <i>e-filing</i> dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak saya				
19	Sistem <i>e-filing</i> sangat fleksibel bagi saya dalam memanfaatkan layanan pelaporan perpajakan				

20	Sistem <i>e-filing</i> memberikan saya manfaat dalam pelaporan pajak				
21	Saya memiliki pengalaman yang menyenangkan selama menggunakan <i>e-filing</i> .				
22	Saya merasa bangga dengan menggunakan sistem <i>e-filing</i>				
23	Saya merasa puas dengan pelayanan sistem <i>e-filing</i>				

### KUESIONER MENGENAI TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SP	P	TP	STP
1	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak.				
2	Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT.				
3	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir pajak.				
4	Sistem <i>self assessment</i> adalah hasil reformasi pajak di Indonesia yang menggantikan sistem <i>official assessment</i>				
5	Sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar				
6	Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.				
7	Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah.				
8	Pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah				
9	Keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- dan Rp. 1.000.000				
11	Keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi Bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar				

**KUESIONER MENGENAI KESADARAN WAJIB PAJAK**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga Negara				
2	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara				
3	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan sangat merugikan Negara				
4	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya				
5	Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu				
6	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri				

**KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).				
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).				
3	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.				
4	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.				
5	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar				
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
7	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
8	Saya selalu melaporkan SPT saya				
9	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.				

## Lampiran 2. Data Uji Validitas Butir Instrumen Dan Reliabilitas

### A. Data Uji Validitas Butir Instrumen dan Reliabilitas Variabel Penerapan *e-filing*

No	Butir pernyataan penelitian e-filing																							Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2	74
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	79
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	80
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	79
6	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	87
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	91
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
14	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	60
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
18	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	81
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
20	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	65
21	3	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	70

<b>22</b>	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	65
<b>23</b>	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	81
<b>24</b>	4	4	3	4	4	4	4	2	4	3	3	2	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	80
<b>25</b>	3	2	3	2	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	2	72
<b>26</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
<b>27</b>	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	69
<b>28</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
<b>29</b>	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	83
<b>30</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
<b>Total</b>	113	111	110	111	111	109	110	108	109	100	106	103	107	108	107	110	112	104	103	106	99	101	102	2460

B. Data Uji Validitas Butir Instrumen dan Reliabilitas Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan

No	Butir pernyataan penelitian Tingkat Pemahaman Perpajakan										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	36
2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	26
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	37
5	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	28
6	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
14	3	3	3	1	3	3	3	4	2	1	26
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	34
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	28
21	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	34
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
23	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36
24	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
25	4	3	2	2	3	4	4	4	2	1	29
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	3	3	1	4	3	3	4	4	33
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	1	4	4	4	4	1	4	34
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
<b>Total</b>	114	111	105	101	105	112	110	109	95	104	1066

C. Data Uji Validitas Butir Instrumen dan Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Butir pernyataan penelitian Kesadaran Wajib Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	3	3	3	3	3	3	18
3	4	4	3	3	4	4	22
4	3	3	3	3	3	4	19
5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	3	3	3	3	3	18
7	4	4	4	4	4	4	24
8	3	3	3	3	4	4	20
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	3	3	3	3	3	19
14	2	2	2	2	2	2	12
15	4	4	4	3	4	3	22
16	3	3	3	3	3	3	18
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	3	4	3	4	4	22
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	3	3	3	4	3	20
21	4	4	4	4	4	4	24
22	3	3	3	3	3	3	18
23	4	4	3	3	3	3	20
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	3	3	4	3	3	20
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	1	1	4	3	4	17
28	4	4	4	3	4	4	23
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
<b>Total</b>	111	104	103	104	108	108	638

D. Data Uji Validitas Butir Instrumen dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Butir pernyataan penelitian kepatuhan									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
15	4	4	3	3	3	3	3	4	4	31
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	3	4	3	3	4	3	32
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	3	3	2	2	3	2	3	3	3	24
21	4	4	2	4	3	2	4	4	4	31
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
23	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
27	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	3	4	3	3	4	4	4	33
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>Total</b>	108	108	103	105	105	102	107	109	108	955



### Lampiran 3. Data Hasil Penelitian

#### A. Hasil Penelitian Variabel Penerapan *e-filing*

No	Butir pernyataan penelitian e-filing																							Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	73
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	65
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	86
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	77
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	82
13	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
14	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	86
15	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	87
16	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	90
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
18	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72
19	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	86
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	87
21	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	88

22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2	74
24	4	4	3	3	4	4	3	3	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	83
25	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	74
26	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	88
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
30	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	74
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	91
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
33	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	69
34	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	66
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	67
36	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	2	2	65
37	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	76
39	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	86
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
42	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2	59
43	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	82
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
45	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	3	2	2	3	2	2	2	57
46	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	70	

47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
48	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	85
49	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	88
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
52	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
57	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	87
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	88
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
60	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	76
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
62	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	84
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
64	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	72
65	3	2	3	2	2	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	4	73
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
67	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	88
68	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	82
69	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	74
70	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	82
Total	248	249	243	242	245	242	239	238	242	233	245	242	249	249	250	255	256	247	241	246	238	239	244	5622

## B. Hasil Penelitian Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan

No	Butir pernyataan penelitian Tingkat Pemahaman Perpajakan										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	35
2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	29
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	32
5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
6	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	33
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
8	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	36
11	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	36
14	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
15	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38
16	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	37
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
20	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	35
21	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
23	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	36
24	3	3	3	3	4	4	3	4	4	2	33
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	34
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
29	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	28
30	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	35
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
33	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	32
34	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	26
35	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	33
36	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	28
37	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38

38	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38
39	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	37
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
42	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	28
43	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
44	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	27
45	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	28
46	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	27
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	3	3	3	4	4	4	3	4	2	4	34
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
50	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	34
51	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	28
52	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
57	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	36
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
60	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	35
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
62	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	32
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
64	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
65	4	3	3	2	2	3	4	4	4	2	31
66	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	30
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
68	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	38
69	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	35
70	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	38
<b>Total</b>	364	358	350	333	341	361	355	354	325	338	3479

### C. Hasil Penelitian Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Butir pernyataan penelitian Kesadaran Wajib Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	4	3	4	3	3	3	20
2	3	3	3	3	3	2	17

<b>3</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>4</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>5</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>6</b>	3	2	2	2	2	3	14
<b>7</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>8</b>	4	4	3	4	4	4	23
<b>9</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>10</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>11</b>	4	4	4	3	4	4	23
<b>12</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>13</b>	4	4	4	4	3	4	23
<b>14</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>15</b>	4	4	3	4	4	4	23
<b>16</b>	4	4	3	4	4	4	23
<b>17</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>18</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>19</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>20</b>	4	3	4	4	4	4	23
<b>21</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>22</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>23</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>24</b>	4	2	2	4	4	4	20
<b>25</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>26</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>27</b>	4	4	3	4	4	4	23
<b>28</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>29</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>30</b>	4	3	4	3	3	3	20
<b>31</b>	4	4	3	3	4	4	22
<b>32</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>33</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>34</b>	3	3	3	2	2	2	15
<b>35</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>36</b>	3	3	3	3	3	2	17
<b>37</b>	4	4	4	4	4	4	24
<b>38</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>39</b>	4	4	3	4	4	3	22
<b>40</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>41</b>	3	3	3	3	3	3	18
<b>42</b>	3	3	3	3	3	2	17
<b>43</b>	4	4	4	3	3	4	22



<b>8</b>	4	4	4	3	3	3	3	4	4	32
<b>9</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>10</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>11</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>12</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>13</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>14</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>15</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>16</b>	4	4	4	4	4	3	4	3	4	34
<b>17</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>18</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>19</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>20</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>21</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>22</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>23</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>24</b>	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
<b>25</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>26</b>	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
<b>27</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>28</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>29</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>30</b>	3	3	4	3	3	4	3	3	4	30
<b>31</b>	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
<b>32</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>33</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>34</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>35</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>36</b>	3	2	3	3	3	3	3	4	3	27
<b>37</b>	4	3	3	4	3	3	3	4	4	31
<b>38</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>39</b>	4	4	3	4	3	4	4	3	4	33
<b>40</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>41</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>42</b>	3	2	3	3	3	3	3	4	3	27
<b>43</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>44</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>45</b>	3	2	3	3	3	3	3	4	3	27
<b>46</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
<b>47</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>48</b>	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35



<b>49</b>	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
<b>50</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>51</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>52</b>	4	3	3	4	3	3	3	4	4	31
<b>53</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>54</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>55</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>56</b>	4	4	3	3	3	4	4	4	4	33
<b>57</b>	4	4	3	4	3	4	4	3	4	33
<b>58</b>	3	3	3	3	3	4	4	3	3	29
<b>59</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>60</b>	3	3	2	2	3	2	3	3	3	24
<b>61</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>62</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>63</b>	3	3	3	3	4	4	4	3	3	30
<b>64</b>	3	2	3	3	3	3	3	4	3	27
<b>65</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>66</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
<b>67</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>68</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>69</b>	3	3	4	3	3	4	3	3	4	30
<b>70</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
<b>Total</b>	242	233	236	239	237	238	241	244	246	2156

#### Lampiran 4. Uji Validitas Data

##### A. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
kepatuhan 1	28.23	18.116	.889	.959
kepatuhan 2	28.23	18.116	.889	.959
kepatuhan 3	28.40	17.628	.808	.964
kepatuhan 4	28.33	17.609	.887	.959
kepatuhan 5	28.33	18.299	.831	.962
kepatuhan 6	28.43	17.633	.813	.963
kepatuhan 7	28.27	18.202	.860	.961
kepatuhan 8	28.20	18.234	.874	.960
kepatuhan 9	28.23	18.254	.857	.961

##### B. Uji Validitas Penerapan *E-filing*

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
E1	77.16	96.504	.774	.964
E2	77.17	96.572	.792	.964
E3	77.24	97.839	.661	.965
E4	77.24	95.920	.705	.965
E5	77.21	95.985	.720	.964
E6	77.25	96.211	.762	.964
E7	77.27	96.711	.741	.964
E8	77.30	97.111	.705	.965
E9	77.25	95.823	.823	.963
E10	77.44	95.127	.724	.964
E11	77.26	96.155	.792	.964
E12	77.31	97.809	.603	.966
E13	77.21	98.822	.617	.965

E14	77.20	98.347	.641	.965
E15	77.20	98.796	.621	.965
E16	77.12	98.434	.682	.965
E17	77.09	98.737	.697	.965
E18	77.26	97.032	.736	.964
E19	77.33	95.265	.804	.964
E20	77.25	97.211	.808	.964
E21	77.39	93.343	.831	.963
E22	77.37	93.828	.807	.964
E23	77.31	95.238	.782	.964

### C. Uji Validitas Tingkat Pemahaman Perpajakan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pemahaman1	31.73	20.892	.749	.881
pemahaman2	31.83	20.075	.850	.874
pemahaman3	32.03	20.240	.636	.882
pemahaman4	32.17	18.282	.592	.889
pemahaman5	32.03	19.826	.535	.889
pemahaman6	31.80	20.648	.732	.880
pemahaman7	31.87	20.395	.743	.879
pemahaman8	31.90	21.059	.566	.887
pemahaman9	32.37	16.930	.700	.882
pemahaman10	32.07	17.099	.757	.874

### D. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kesadaran1	17.57	7.151	.726	.896

Kesadaran2	17.80	6.234	.753	.894
Kesadaran3	17.83	6.144	.787	.888
Kesadaran4	17.80	7.131	.674	.902
Kesadaran5	17.67	6.644	.879	.875
Kesadaran6	17.67	7.057	.714	.897

### Lampiran 5. Uji Reliabilitas Data

#### A. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.965	9

#### B. Uji Reliabilitas Penerapan *e-filing*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.966	23

#### C. Uji Reliabilitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.892	10

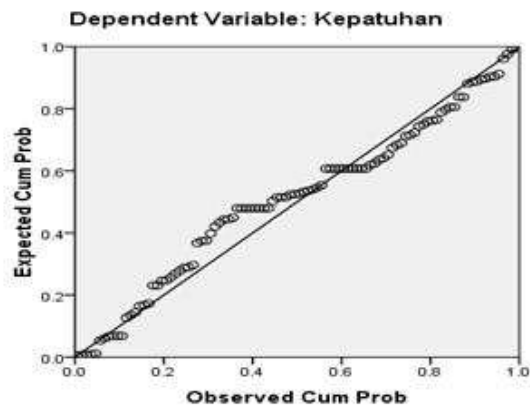
#### D. Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.909	6

## Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

### A. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.62392124
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.057
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.191
Asymp. Sig. (2-tailed)		.117

a. Test distribution is Normal.

### B. Uji Linearitas

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 <sup>a</sup>	.651	.641	2.665	1.802

a. Predictors: (Constant), E-Filling, Pemahaman Pajak, Kesadaran

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 <sup>a</sup>	.651	.641	2.665	1.802

a. Predictors: (Constant), E-Filling, Pemahaman Pajak, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan

### C. Uji Multikolinearitas

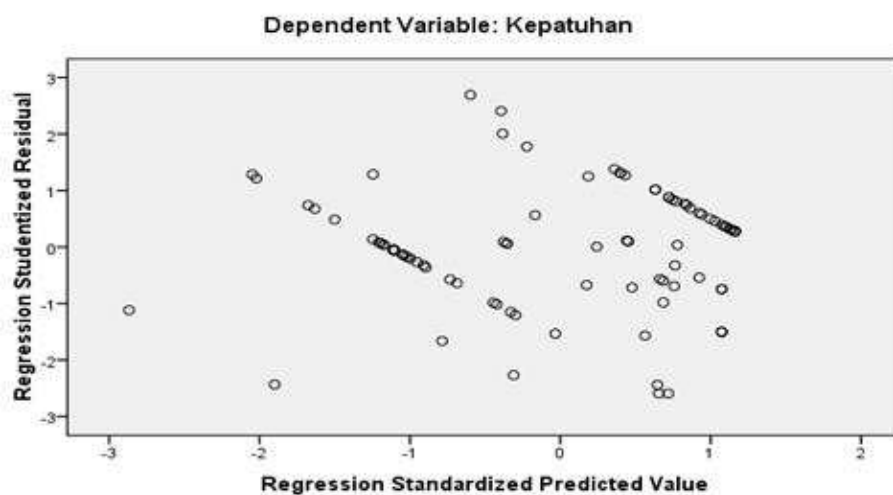
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.724	2.286		1.191	.236		
	E-Filling	.079	.040	.182	1.954	.054	.420	2.381
	Pemahaman Pajak	.119	.094	.122	1.276	.205	.398	2.515
	Kesadaran	.854	.146	.568	5.833	.000	.382	2.616

a. Dependent Variable:

Kepatuhan

### D. Uji Heteroskedastisitas

**Scatterplot**

## Lampiran 7. Uji Hipotesis

### A. Uji Regresi Linear Sederhana

#### 1. Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 <sup>a</sup>	.454	.449	3.300

a. Predictors: (Constant), e filing

b. Dependent Variable: kepatuhan wp

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.427	2.642		2.811	.006
	e filing	.293	.032	.674	9.033	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wp

#### 2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 <sup>a</sup>	.444	.438	3.331

a. Predictors: (Constant), pemahaman pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wp

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.380	2.591		3.235	.002
	pemahaman pajak	.653	.074	.666	8.848	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan

wp

### 3. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 <sup>a</sup>	.621	.617	2.751

a. Predictors: (Constant), kesadaran

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.373	1.973		3.231	.002
	kesadaran	1.184	.094	.788	12.664	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan



## B. Uji Regresi Linear Berganda

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 <sup>a</sup>	.651	.641	2.665

a. Predictors: (Constant), e filing, pemahaman pajak, kesadaran wp,

b. Dependent Variable: kepatuhan wp

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1274.179	3	424.726	59.820	.000 <sup>a</sup>
	Residual	681.611	96	7.100		
	Total	1955.790	99			

a. Predictors: (Constant), kesadaran wp, e filing, pemahaman pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wp

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.724	2.286		1.191	.236
	e filing	.079	.040	.182	1.954	.054
	pemahaman pajak	.119	.094	.122	1.276	.205
	kesadaran wp	.854	.146	.568	5.833	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan

wp

## Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JALAN RING ROAD UTARA NOMOR 10, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA - 55282  
TELEPON (0274) 4333951-53, FAKSIMILE (0274) 4333954, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200,  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 85 /WPJ.23/BD.05/2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Penelitian

14 DEC 2015

Yth. Kepala KPP Pratama Yogyakarta  
Jalan Panembahan Senopati No.20  
Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-4241/XWPJ.23/KP.02/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 terkait hal Penerusan Permohonan Ijin Penelitian atas :

Nama : Wulandari Agustiniingsih  
NPM : 12812141020  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 / Akuntansi  
Universitas/Instansi : Universitas Negeri Yogyakarta  
Keperluan/Instansi : Penelitian untuk Pembuatan Skripsi  
Judul : "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Yogyakarta"

dengan ini Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta **memberikan izin** untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/ data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan memberikan *soft-copy* dan *Hard-copy* hasil riset/ penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) sedangkan *Hard-copy* dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat dilaksanakannya penelitian.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kanwil DJP D.I.Y  
Kepala Bidang P2Humas  
Ayu Nanta Wuryansari  
NIP.196711181995032001